

ABSTRAK

Kerja sama antara *International Organization for Migration* (IOM) dan pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia telah berjalan sejak tahun 2000. Tetapi, pada periode tahun 2019-2023, kasus perdagangan manusia di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang mempengaruhi kerja sama antara IOM dan pemerintah Indonesia dalam memberantas perdagangan manusia di Indonesia tahun 2019-2023 menggunakan teori keberhasilan kerja sama internasional menurut Keohane dan Axelrod. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya jumlah aktor yang terlibat menciptakan kompleksitas koordinasi antar aktor dan adanya tumpang tindih tanggung jawab. Selain itu, lambannya respons pemerintah Indonesia terhadap perubahan pola perdagangan manusia, yaitu modus-modus baru perdagangan manusia seperti penggunaan teknologi, menyebabkan hambatan dalam proses kerja sama.

Kata kunci: kerja sama, perdagangan manusia, IOM, pemerintah Indonesia

ABSTRACT

The cooperation between the International Organization for Migration (IOM) and the Indonesian government in addressing human trafficking in Indonesia has been ongoing since 2000. However, during the 2019-2023 period, cases of human trafficking in Indonesia continued to increase significantly. This study analyzes the obstacles affecting the cooperation between IOM and the Indonesian government in combating human trafficking in Indonesia from 2019 to 2023, using the theory of international cooperation success by Keohane and Axelrod. This research employs a qualitative method based on a literature review to identify factors that hinder collaboration. The findings reveal that the large number of actors involved creates coordination complexities and overlapping responsibilities. Furthermore, the Indonesian government's slow response to changes in human trafficking patterns, such as the emergence of new trafficking methods utilizing technology, poses additional challenges to the collaboration process.

Keywords: cooperation, human trafficking, IOM, Indonesian government